

2.15.000036

## Data Angkutan Laut Kewenangan kab/kota dengan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT

PK

Ewalidata

Kode	2.15.000036
Produsen Data	DINAS PERHUBUNGAN
Bidang Urusan	PERHUBUNGAN
Sifat Data	Ewalidata
Satuan	unit
Tgl. Input Data	15 August 2024
Tgl. Diperbaharui	15 August 2024

### DEFINISI & METODOLOGI

#### Konsep

Data Angkutan Laut Kewenangan kab/kota dengan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT

#### Klasifikasi

Kabupaten

#### Definisi

kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola angkutan laut di wilayahnya, terutama untuk kepentingan masyarakat lokal. Kewenangan ini mencakup perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait angkutan laut. yang melayani rute-rute dalam wilayah administratif tersebut, seperti pelabuhan-pelabuhan kecil dan layanan kapal-kapal yang beroperasi di dalam kabupaten/kota.

#### Cara Interpretasi

Semakin tinggi angkutan laut, semakin besar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia

#### Metode Pengumpulan

penjumlahan

#### Ukuran / Rumus

Jumlah

### # Series Column

Indikator

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

**Data Angkutan Laut Kewenangan kab/kota dengan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT**

—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---